BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak positif dari reformasi yaitu dengan terbentuknya Desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan Otonomi Daerah. Desentralisasi adalah perpindahan wewenang atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintahan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah. Dengan adanya desentralisasi maka adanya kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk bisa mengelola sumber dayanya sendiri (Indra Bastian, 2001).

Desentralisasi yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2001, setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan yang ada pada pemerintah daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari peran serta instansi-instansi yang ada pada pemerintah daerah termasuk pula peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya dengan baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang anggaran. Melalui anggaran dapat dilakukan perencanaan dan pengendalian, karena anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien (Indra Bastian, 2001).

Menurut Munandar (1994) anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam unit moneter dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat anggaran secara lebih luas antara lain disebutkan sebagai alat bantu manajemen dalam mengorganisasi kegiatan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja manajer. Anggaran juga memiliki peranan sebagai alat pedoman kerja, pengorganisasian kerja dan pengawasan.

Pengetahuan tentang anggaran akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran merupakan alat efektif untuk mengendalikn dan menilai kinerja. Anggaran mempunyai peranan penting dalam menilai kinerja. Ukuran penilaian kinerja dalam organisasi yaitu berdasarkan pada konsep *value for money*, artinya lebih meningkatkan mutu/ kualitas pelayanan kepada rakyat dengan uang rakyat serta dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut kepada rakyat (Sri Rustiyaningsih, 2004).

Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi termasuk pemerintah, anggaran mempunyai posisi yang sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang (Indra Bastian, 2001).

Dampak positif lain yang muncul dengan adanya reformasi adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas. Tuntutan akuntabilitas terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan

hak-hak publik. *Good governance* yaitu pengelolaan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggungjawab karena pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian tujuan *clean governance* atau pemerintah yang bersih (Indra Bastian, 2001). Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi diperlukan *intern control* dan *exstern control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Sopanah dan Mardiasmo, 2003). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan lembaga dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Maka peranan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan pemerintah (Indra Bastian, 2001).

Dampak positif lain dengan adanya reformasi yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah melalui partisipasi mereka dalam menyusun anggaran dan juga melalui analisis terhadap laporan keuangan yang dilaporkan oleh unit kerja pemerintah (Sri Rustiyaningsih, 2004).

Melalui pertanggungjawaban dalam laporan keuangan, masyarakat dapat mengetahui dan mengevaluasi pengeluaran pemerintah. Disini diketahui apakah terjadi pemborosan/ketidakefisienan penggunaan dana dari masyarakat, dan dapat mengetahui apakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan atau sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya diberikan (Sri Rustiyaningsih, 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) menunjukkan bahwa pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Sedangkan interaksi pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) terletak pada responden dan lokasi, dalam penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menjadi respondennya adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berlokasi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) komisi C yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki jabatan khusus bagian keuangan yang ada di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) 1 yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten

Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung, penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2008.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini adalah:
“PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan dibatasi pada pengaruh pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran, pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari pembagian kuesioner pada komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) 1 yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran yang dimoderasi oleh partisipasi

masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang anggaran yang dimoderasi oleh transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi pemerintah daerah

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan anggaran (APBD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good goverment*).

2. Manfaat penelitian bagi para akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terutama pengembangan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

3. Manfaat penelitian bagi peneliti

Memberikan wawasan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam dunia nyata.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar berfikir dan menganalisa masalah yang ada, anggaran, keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, pengetahuan dan pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat dan pengawasan keuangan daerah, transparansi kebijakan publik dan pengawasan keuangan daerah. Bab ini juga menjelaskan penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis atau model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel dan pengukuran variabel, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini diuraikan tentang data penelitian, deskripsi responden, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear, uji signifikansi parameter individual, hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini diuraikan tentang simpulan, keterbatasan dan saran.